

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini masyarakat terhadap akuntansi sektor publik mulai berkembang. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penelitian-penelitian yang membahas dan menganalisis mengenai akuntansi sektor publik, khususnya mengenai kinerja yang ada dalam pemerintahan. Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas (Mahmudi, 2010:12). Berdasarkan segi akuntansi misalnya, pemerintah semakin menekankan agar setiap daerah membuat laporan keuangan setiap tahunnya. Sedangkan dari segi regulasi, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah (undang-undang ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Undang-undang ini merupakan wujud pemberian otonomi yang luas kepada daerah (pemerintahan daerah) yang dikenal dengan kebijakan otonomi daerah.

Sesuai dengan tujuan otonomi dan *outcome*, penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah yaitu menuntun kemandirian suatu daerah sehingga upaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah dan sumber dana bagi daerah dalam rangka membiayai aktifitas operasional pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, dan sumber dana daerah melalui dana perimbangan yaitu dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan pendapatan transfer.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD

akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Selain Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pembangunan daerah tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan dalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal. Alokasi belanja modal dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. Menurut Nugroho dan Rohman (2012) belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas masyarakat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

PAD, dana perimbangan dan belanja modal adalah salah satu instrumen untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. Menurut Halim (2007), pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, salah satunya dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi dapat pula dinikmati oleh masyarakat sampai yang paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah (Hamzah, 2008). Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi indikator keberhasilan pembangunan dan familiar bagi masyarakat umum. Pertumbuhan

ekonomi berarti adanya kenaikan pendapatan dari daerahnya itu sendiri tanpa memandang kenaikan itu besar atau kecil.

Perekonomian Jawa Timur tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.540,7 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp39,9 juta atau US\$3.362,1. Ekonomi Jawa Timur tahun 2014 tumbuh 5,86 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 6,08 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum sebesar 8,88 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit sebesar 13,39 persen.

Dilansir dari detiknews, turunnya penilaian BPK RI terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi evaluasi Panitia Kerja Laporan hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI.Panja dalam melaksanakan tugasnya telah berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomro 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK," ujar Sri Untari, Ketua Panja Pembahas LHP BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, Senin (29/6/2015).Pada intinya, kata Untari, ada 2 temuan BPK atas laporan keuangan Pemprov Jatim tahun anggaran 2014 yakni, terkait Sistem Pengendalian Intern. Serta Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Panja berharap, agar Pemprov Jatim menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI.

Dari data dan fenomena tersebut terlihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai belum baik. Salah satu instrumen untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dan disahkan (Halim, 2007:230). Tujuan melakukan analisis rasio keuangan adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi, serta upaya fiskal suatu daerah. Selain itu juga sebagai alat evaluasi terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran yang dibuat.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk **Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada periode waktu dari tahun 2014-2016.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
4. Apakah PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah?
5. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah?
6. Apakah Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah?
7. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
5. Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
6. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
7. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah kota surabaya dalam menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dibidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu akuntansi pemerintahan pada khususnya untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi jawa timur.